

**EVALUASI SISTEM KOMPUTERISASI *ONLINE* TENAGA KERJA LUAR NEGERI
(SISKOTKLN) (Study Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Lampung Tengah)**

(Skripsi)

Oleh

REGITA PUTRI MELINDA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

EVALUASI SISTEM KOMPUTERISASI *ONLINE* TENAGA KERJA LUAR NEGERI (SISKOTKLN) (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh

REGITA PUTRI MELINDA

Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) merupakan sistem yang dikembangkan dengan maksud agar pemerintah dapat memberikan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan yang layak, cepat, murah dan efisien kepada warga negaranya yang akan bekerja ke luar negeri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 SISKOTKLN adalah sistem pelayanan berbasis teknologi informasi terpadu yang melibatkan stakeholder dan instansi terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan dan hasil serta kendala pelaksanaan program SISKOTKLN dalam upaya penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian, ketercapaian program SISKOTKLN pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah yang diukur dengan menggunakan indikator *Goal Oriented Evaluation Model* (Tyler, 1983). Peneliti mengukur hasil dari dua indikator ketercapaian tujuan dan hasil yang menunjukkan bahwa program SISKOTKLN telah mencapai sebagian dari tujuannya. Pertama, ketercapaian tujuan SISKOTKLN berdasarkan UU No. 18/2017 yakni mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan TKI sudah tercapai, akan

tetapi untuk memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan CTKI/TKI pada pelaksanaannya belum tercapai. Indikator kedua untuk ketercapaian hasil program SISKOTKLN telah terlaksana dengan cukup baik. Sementara itu, terdapat beberapa kendala internal yang ditemukan pada sistem dan kendala eksternal seperti kurang memadainya sarana dan prasarana serta kurangnya sumber daya manusia yang menunjang pelayanan SISKOTKLN pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.

Kata kunci: Evaluasi Program, Tenaga Kerja Indonesia, Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI

ABSTRACT

EVALUATION OF ONLINE COMPUTERIZED SYSTEMS OF OVERSEAS FOREIGN WORKERS

By

REGITA PUTRI MELINDA

The Online Computerized System of Foreign Workers (SISKOTKLN) is a system developed with the intention that the government can provide services in the context of proper and fast placement and protection for its citizens who will work abroad. Based on Law No. 18 of 2017 SISKOTKLN is an integrated information technology-based service system involving stakeholders and related agencies.

This study aims to evaluate the achievement of the objectives and results and the constraints of the implementation of the SISKOTKLN program in the effort to place and protect Indonesian workers (TKI) in Kab. Lampung Tengah

Based on the results of the research, the achievements of the SISKOTKLN program at the Central Lampung District Manpower and Transmigration Office were measured using the Goal Oriented Evaluation Model indicator (Tyler, 1983). The researcher measured the results of two indicators of achieving goals and results that showed that the SISKOTKLN program had achieved part of its objectives. First, achieving the objectives of SISKOTKLN based on Law No. 18/2017, which is to realize the effectiveness of the placement and protection of migrant workers services and accelerate the improvement of the quality of service for Indonesian migrant workers, but to provide efficiency and transparency in the management of CTKI / TKI placement and protection documents on their implementation has not been achieved. The second indicator for achieving the results of the SISKOTKLN program has been implemented quite well. Meanwhile, there were several internal constraints found in the system and

external constraints such as inadequate facilities and infrastructure and a lack of human resources that supported the services of SISKOTKLN at the Central Lampung District Manpower and Transmigration Office.

Keywords : Program Evaluation, Indonesians Workers, Placement Services and Protection of Indonesian Migrant Workers

**EVALUASI SISTEM KOMPUTERISASI *ONLINE* TENAGA KERJA LUAR NEGERI
(SISKOTKLN) (Study Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Lampung Tengah)**

Oleh

REGITA PUTRI MELINDA

(Skripsi)

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK
Pada
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **EVALUASI SISTEM KOMPUTERISASI *ONLINE*
TENAGA KERJA LUAR NEGERI (SISKOTKLN)
(Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan
Trasmigrasi Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : **Regita Putri Melinda**

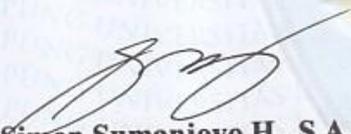
No. Pokok Mahasiswa : 1516041061

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.P.A.
NIP 19810628 200501 1 003


Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP 19840630 201504 2 002

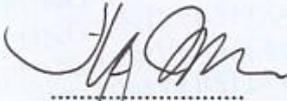
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

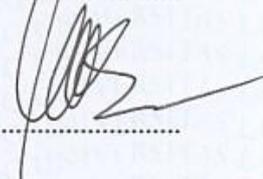

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA.**.....

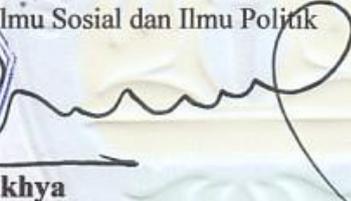
Sekretaris : **Ita Prihantika, S.Sos., M.A.**.....

Penguji Utama : **Dra. Dian Kagungan, M.H.**.....

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 April 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/AhliMadya), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 22 April 2019
Yang membuat pernyataan,



Regita Putri Melinda
NPM. 1516041061

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Regita Putri Melinda, lahir di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 16 Agustus 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Lisman dan Ibu Anita Sary Sofyan. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Lampung Utara pada tahun 2001-2003. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Kelapa Tujuh Lampung Utara pada tahun 2003-2009. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Lampung Utara pada tahun 2009-2010 dan SMP Negeri 4 Terbanggi Besar pada Tahun 2010-2012. Setelah itu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2012-2015.

Setelah itu penulis terdaftar menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui penerimaan mahasiswa jalur Mandiri. Selama menjadi mahasiswa penulis tergabung dalam beberapa kegiatan seperti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada periode pertama Januari 2018 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bertempat di Desa Toto Mulyo, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

“Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga”

(Nabi Muhammad SAW)

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar”.

(Ummar Bin Khattab)

“Its not about how big mistake that we make, but how big our efforts for learn and changed after that”.

(Regita Putri Melinda)

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku:

Lisman dan Anita Sary Sofyan

Yang selalu menyayangi dan medoakanku dengan tulus serta sumber penyemangat dalam hidupku.

Adik-adikku Eza dan Pio yang senantiasa menjadi warna dalam hidupku.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Para pendidik dan Almamater tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah)” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik (S.A.P) di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. Syarif Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Noverman Duadji, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

1. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N.,M.PA. Selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah banyak memberikan masukan, saran dan nasihat serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing kedua. Penulis mengucapkan terima kasih atas motivasi, saran dan bimbingannya yang sangat banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
3. Ibu Dra. Dian Keagungan, M.H selaku dosen penguji. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan serta masukan, saran, kritikan, nasihat dan bimbingannya yang sangat bermanfaat dan juga banyak membantu sehingga penulis mampu menyelesaikan menyelesaikan proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP,M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang turut membantu memberikan kemudahan dan motivasi selama kuliah
5. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Prof. Yulianto, Pak Bambang, Pak Dedy, Pak Syamsul, Ibu Intan, Ibu Devi, Pak Eko, Pak Nana, Ibu Meiliyana, Ibu Rahayu, Ibu Selvi dan Ibu Anisa terimakasih banyak untuk semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
6. Pak Azhari dan Pak Johari selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu dalam hal administratif. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya selama ini.

7. Terimakasih untuk Keluargaku yang sangat aku sayangi, Papa dan Mama dan adikku, Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, pengorbanan, pelajaran yang selama ini kalian berikan. Terimakasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini diberikan untuk menyelesaikan studiku sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik.
8. Teman-teman Atlantik di jurusan Ilmu Administrasi Publik yaitu (Ade Siska, Anggi, Anggita, Aldino, Apriyana, Aulia Rossa, Bang Rahmat, Basri, Bayu, Bima, Bobby, Cindy, Cory, Dedy, Desy, Dinda, Dwiyan, Devy, Elva, Eko, Evi, Farida, Fitri, Galuh, Gita, Hawim, Lidya, Intan, Irma, Kenda, Lulu, Mahda, Meika, Melani, M. Riswan, Nafi', Nandita, Naurah, Nila, Nisa, Nurma, Onisa, Pradita, Realita, Ria, Rifky, Rika, Shinta, Sonia, Suryo, Tiwi, tyas, Vera, Vony, Wiwik, Yuan, serta yang tidak bisa disebut satu persatu. Terimakasih teman-teman yang sudah menemani selama empat tahun ini memberi semangat dan masukan
9. Terimakasih kepada Desta Rapanca dan Diah Perdana yang selalu mendukung dan menemani dalam pengerjaan skripsi ini. Makasih juga sudah luangin waktu untuk dengerin segala keluhan aku dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, dan mengajarkan aku untuk terus semangat.
10. Sahabat-sahabat SMA (Uci, Futra dan Vika) Terimakasih sudah menemani dari kurang lebih tujuh tahun ini tempat mengisi kehidupan senang dan sedihku.

11. Sahabat-sahabat dekat ku selama 4 tahun kuliah (Berzsa, Bestha, dan Kartika)
Terimakasih telah mengisi hari-hari ku dengan canda, tawa dan semangat,
Semoga kalian juga semangat menyelesaikan skripsinya karena waktu terus berjalan.
12. Kepada kedua ayukku yang cantik Ricca Yunita dan Ullita Aprilia,
terimakasih atas perhatian dan dukungan moralnya selama ini.
13. Teman-teman KKN Squad Toto Mulyo yang tercinta (Ardes, Bang Dewa,
Bang Irfan, Diah, dan Eko) Terimakasih banyak sudah menjadi keluarga kecil
bahagia selama lebih dari 40 hari bersama berbagi pengalaman
14. Segenap Informan Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lampung Tengah penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak
Sofyan selaku Kepala Dinas, Ibu Faiza, Ibu Sri Hanturyati, Ibu Nissa dan
beberapa staff lainnya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak dan
ibu atas informasi dan juga data-data, bantuan, dan juga waktu luang yang
telah diberikan kepada penulis, penulis merasa sangat terbantu dengan
bantuan-bantuannya dalam proses penelitian, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
15. Segenap Informan Penelitian di BP3TKI Provinsi Lampung. Penulis
mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu atas informasi dan juga data-
data, bantuan, dan juga waktu luang yang telah diberikan kepada penulis,

16. Seluruh pihak yang membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih untuk semuanya

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, 18 April 2019

Penulis

Regita Putri Melinda

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan Publik.....	12
1. Definisi Kebijakan Publik.....	12
B. Tinjauan Evaluasi.....	13
1. Definisi Evaluasi.....	13
2. Indikator Evaluasi.....	14
C. Tinjauan Evaluasi Program.....	18
1. Definisi Evaluasi Program.....	18
2. Model Evaluasi Program.....	20
D. <i>Goal Oriented Evaluation Model</i>	28
E. Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).....	31
F. Penelitian Terdahulu.....	41
G. Kerangka Pikir.....	43

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisa Data.....	54

G. Teknik Keabsahan Data.....	56
-------------------------------	----

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
1. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah.....	58
2. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.....	63
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	78
1. Tujuan Pelaksanaan SISKOTKLN.....	78
2. Hasil SISKOTKLN.....	87
3. Kendala Pelaksanaan SISKOTKLN.....	93
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	100
1. Tujuan Pelaksanaan SISKOTKLN.....	100
2. Hasil SISKOTKLN.....	113
3. Kendala Pelaksanaan SISKOTKLN.....	116

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA.....	124
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	127
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Pelayanan TKI Bermasalah Periode Tahun 2010-2012	2
2. Jumlah Penempatan TKI Provinsi Lampung tahun 2017.....	6
3. Indikator Evaluasi.....	14
4. Penelitian Terdahulu.....	41
5. Informan Terkain Evaluasi SISKOTKLN.....	52
6. Dokumentasi Terkait SISKOTKLN	53
7. Jumlah pengaduan TKI berdasarkan skema penempatan tki kab. Lampung tengah	108

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
1. Kebijakan sebagai suatu proses.....	13
2. Alur Penempatan dan Perlindungan TKI.....	36
3. Kerangka Pikir.....	47
4. Struktur Organisasi DISNAKERTRANS Kab. Lampung Tengah	67
5. Diagram Alur Proses SISKOTKLN	70
6. Alur tata cara Penempatan TKI	76
7. Tampilan SISKOTKLN Input Data CTKI	81
8. Penerbitan e-KTKLN	88
9. Pemerintah Daerah bersama keluarga korban TKI bermasalah	91
10. Ruang Pelayanan dan ruang tunggu pelayanan SISKOTKLN di DISNAKERTRANS Kab. Lampung Tengah	98
11. Grafik Penempatan TKI	103

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga Kerja Indonesia atau yang biasa disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah. Namun, berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, istilah TKI saat ini berganti dengan PMI yaitu Pekerja Migran Indonesia.

Penempatan TKI atau PMI ke luar negeri akan menghasilkan devisa bagi negara, jadi sudah semestinya pemerintah bertugas untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri sebagaimana diamanatkan pada pembukaan UUD NKRI 1945 alinea keempat menjelaskan bahwa “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.

Meskipun banyak mendatangkan devisa bagi negara dan daerah serta turut serta memecahkan persoalan ketenagakerjaan di dalam negeri, tak bisa dipungkiri perlindungan yang diperoleh para Pekerja Migran Indonesia masih sangat terbatas. Kondisi ini bisa dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran hak tenaga kerja yang sering terjadi setiap tahunnya baik pada tahap pra penempatan, pada saat penempatan, maupun setelah penempatan yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Pelayanan TKI Bermasalah Periode Tahun 2010-2012

No.	Jenis Masalah	2010	2011	2012
1.	PHK Sepihak	22.123	11.804	9.088
2.	Majikan Bermasalah	4.358	9.695	7.221
3.	Sakit akibat berkerja	12.772	7.263	4.959
4.	Gaji tidak dibayar	2.874	1.723	2.139
5.	Penganiyayaan	4.336	2.137	1.633
6.	Pelecehan Seksual	2.978	2.186	1.202
7.	Pekerjaan tidak sesuai PK	989	744	884
8.	Dokumen tidak lengkap	1.894	1.454	699
9.	Sakit Bawaan	1.773	2.328	570
10.	Majikan meninggal	677	633	532
11.	Kecelakaan Kerja	867	732	431
12.	TKI hamil	471	531	307
13.	Membawa anak	161	402	214
14.	Tidak mampu berkerja	868	290	205
15.	Komunikasi tidak lancar	534	415	188
16.	Lain-lain	2.734	2.095	1.256
	Total	60.399	44.432	31.528

(Sumber : *Puslitfo BNP2TKI, 2013*)

Berdasarkan Tabel 1 terlihat pada tahun 2010 jumlah pelayanan TKI bermasalah mencapai 60.399 orang, pada tahun 2011 jumlah TKI yang bermasalah sebanyak 44.432, dan pada tahun 2012 berjumlah 31.528 orang yang terbagi kedalam beberapa jenis permasalahan. Pada tahun 2010 hingga 2012 permasalahan TKI mengalami penurunan.

Mekanisme penyelesaian atas berbagai kasus yang dihadapi tenaga kerja Indonesia di luar negeri saat ini nyatanya masih belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Beberapa kasus yang pernah terjadi seperti pada tahun 2015 seorang TKW asal Lampung Tengah, Muntiani binti Pani (43) meninggal di Malaysia dan harus dipulangkan ke Indonesia dikarenakan sakit. (<https://www.antaranews.com/> diakses pada tanggal 4 september 2018). Sebelumnya pada tahun 2012 bahkan pernah terjadi kasus tenaga kerja wanita Indonesia (TKW) bernama Ari Puspitawati dan Mulatri Lestari dari Kabupaten Lampung Tengah hilang kontak dengan keluarganya hingga sekarang. Melihat beberapa kasus yang sering kali dialami oleh TKI yang bekerja di luar negeri, hal ini tidak sebanding dengan sumbangan yang mereka berikan. (<http://www.liputanbmi.com/baca/2037/mulatri-lestari-tkw-di-malaysia-asal-lampung-10-tahun-tanpa-kabar> diakses pada tanggal 4 september 2018)

Banyaknya kasus TKI bermasalah yang terjadi dikarenakan sebelum adanya SISKOTKLN penempatan TKI ke luar negeri tidak diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Para TKI berangkat secara non-prosedural dan tidak terdata di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga mereka rentan terhadap pengawasan dan perlindungan dari pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sudah tidak sesuai

lagi dengan kondisi dan perkembangan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sehingga perlu disempurnakan. Sudah semestinya pemerintah bertugas melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut melalui suatu sistem seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, pasal 7 butir (c) menyatakan bahwa: Salah satu kewajiban pemerintah adalah “membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri”. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negaranya untuk itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia membangun SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) yang merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional E-Government.

Pelayanan penempatan dan perlindungan adalah layanan fasilitas calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri harus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Layanan yang diberikan yakni layanan di Unit Pelayanan Publik Pusat yang meliputi penerbitan Surat Ijin Pengerahan (SIP), penempatan pemerintah (*Government to Government* dan *Government to Private*), melakukan pendataan dan *updating*, serta melakukan pengawasan dan pengendalian penempatan TKI melalui SISKOTKLN yang dilakukan oleh seluruh stakeholder. Sedangkan layanan di daerah meliputi *registrasi* TKI

Mandiri/Formal/*Re-Entry*, verifikasi dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dan penerbitan e-KTKLN (*bnp2tki.go.id* diakses pada tanggal 29 agustus 2018).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja No. PER-26/KA/X11/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi *Online* Tenaga Kerja Luar Negeri, SISKOTKLN adalah sistem pelayanan administrasi penempatan TKI dan penerbitan Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) yang melibatkan seluruh stakeholder terkait. SISKOTKLN bertujuan untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang layak, cepat, murah dan efisien kepada warga negaranya yang akan bekerja keluar negeri serta sasaran dari program ini adalah tersedianya *database* penempatan TKI yang bekerja di luar negeri yang dapat diakses dimana saja secara online dan *real time*, sehingga perlindungan yang diberikan kepada TKI dapat lebih optimal.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu dari kabupaten di Provinsi Lampung yang banyak melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kabupaten Lampung Tengah termasuk kabupaten kedua terbanyak melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri setelah Lampung Timur yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Rekapitulasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Asal Provinsi Lampung Berdasarkan Kab – Kota
Periode Tahun 2012 S.D 2017**

No.	Kab-Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
1.	Lampung Timur	5.648	7.200	7.582	6.692	5.994	5.473	38.589
2.	Lampung Tengah	1.909	2.342	2.327	2.277	2.456	2.449	13.760
3.	Lampung Selatan	2.481	2.580	2.308	1.860	1.789	1.594	12.612
4.	Pesawaran	1.432	912	1.235	1.103	946	998	6.626
5.	Tanggamus	826	828	1.003	787	716	806	4.966
7.	Lampung Utara	724	678	698	518	546	626	3.790
6.	Bandar Lampung	1.041	882	654	384	358	180	3.499
8.	Pringsewu	525	747	723	556	702	534	3.787
9.	Tulang Bawang	461	538	442	337	444	552	2.774
10.	Tulang Bawang Barat	154	300	448	668	971	768	2.541
12.	Mesuji	205	262	400	484	639	300	2.290
11.	Lampung Barat	526	306	289	80	64	75	1.340
13.	Metro	200	229	226	208	219	230	1.312
14.	Way Kanan	127	171	165	153	194	195	1005
15.	Pesisir Barat	0	0	0	2	11	0	13
	Total	16.259	17.975	18.500	16.109	16.049	14.780	98.904

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018)

Pada Tabel 1 diatas sedikit menjelaskan jumlah penempatan TKI Provinsi Lampung periode tahun 2012-2017 yang seluruhnya berjumlah 98.904 orang. Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten pengiriman TKI terbanyak kedua yakni 13.760 orang yang terbagi dalam sektor formal dan informal, setelah Lampung Timur yang berjumlah 38.589 orang yang terbagi ke dalam sektor formal dan sektor informal begitupun seterusnya.

Berdasarkan hasil pra-riset, peneliti memperoleh informasi dari Kepala Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing Ibu L. Sri Hanturyati, terkait permasalahan penempatan dan perlindungan TKI. Pertama, saat ini banyak TKI yang berangkat tidak

sesuai prosedur, mereka (para TKI) yang mendaftarkan diri menjadi TKI melalui sponsor dan informasi dari omongan teman, tetapi informasi yang mereka dapat salah karena mereka mendapatannya dari 'calo', ada juga TKI yang bermasalah karena PPTKIS agensi para TKI banyak yang memalsukan dokumen terutama umur, bahkan nama dan alamat mereka, sehingga berakibat pada rendahnya pengawasan dan perlindungan terhadap CTKI/TKI yang akan berkerja di luar negeri” (Hasil wawancara, 03 Oktober 2018).

Senada dengan itu Na’fiah (2015) mengatakan sebagian besar para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendaftarkan diri sebagai CTKI melalui sponsor lalu melakukan praktik pemalsuan dokumen disebabkan karena terbatasnya informasi yang diperoleh calon tenaga kerja, sehingga mereka terjerat dengan praktik percaloan yang akhirnya membahayakan mereka diri sendiri, selanjutnya pemalsuan identitas juga merupakan salah satu diantara praktik-praktik penyimpangan dalam proses rekrutmen dan pemberangkatan TKI yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyimpangan tersebut berdampak pada rancunya informasi yang diperoleh oleh pemerintah. Rancunya informasi tersebut membatasi peran pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja di luar negeri. Sehingga tidak jarang permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses penempatan sering terlewatkan oleh pemerintah. Hal ini karena lemahnya manajemen pengawasan pemerintah, khususnya bagi TKI yang bekerja pada sektor informal seperti pembantu rumah tangga. Persoalan-persoalan

tersebut berimplikasi negatif terhadap perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.

Pemerintah daerah selaku Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung harus ikut serta dalam mensosialisasikan peraturan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Lampung. Penerapan SISKOTKLN di Kabupaten Lampung Tengah ini sudah berjalan sejak tahun 2012, penerapan sistem ini diharapkan dapat menanggulangi pemalsuan dokumen dan jual beli sertifikat kesehatan serta praktik percaloan. Secara teknis, dalam SISKOTKLN, semua calon TKI harus terdata di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai asal KTP. Data yang dimasukkan database antara lain nama, alamat, tempat tanggal lahir, nama orangtua, perusahaan yang menempatkan, nama agensi di luar negeri, serta nama majikan dan jenis pekerjaan calon TKI, dengan demikian, maka akan mendorong tertib administrasi bagi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen, pelatihan dan pendidikan serta penempatan tenaga kerja ke luar negeri, sehingga mempermudah pemerintah dalam pengawasan para TKI karena dokumen dan informasi yang valid.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Faiza selaku Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, peneliti mendapatkan informasi mengenai permasalahan terkait SISKOTKLN, dalam pelaksanaan SISKOTKLN kendala gangguan server/jaringan komunikasi data secara nasional sering mengalami down

dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) pusat yang tidak bisa terkoneksi dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), lalu SISKOTKLN sering mengalami overload, selanjutnya masalah mekanisme pengisian data terhadap tenaga kerja oleh operator ke dalam SISKOTKLN juga masih belum valid, sering terjadinya kesalahan data, seperti nama dan NIK calon TKI. (Hasil wawancara, 03 Oktober 2018).

Cahyono (2015) dan Martoyo (2015) menyimpulkan sistem ini (SISKOTKLN) terus mengalami perubahan dan perbaikan, namun sejauh ini belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemanfaatan sistem, khususnya dari sudut pandang pengguna selaku pengguna sistem yang secara langsung merasakan, menggunakan dan memanfaatkan sistem ini, maka dari itu diperlukan strategi khusus yang antisipatif untuk mengatasi permasalahan dalam sistem ini.

Terkait berbagai permasalahan yang ada diperlukan adanya evaluasi terhadap program SISKOTKLN. Menurut Anderson dalam Wirnana (2008) evaluasi perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan dan hasil dari program. Sehingga sistem ini tidak hanya berhenti pada tataran pencatatan jumlah tenaga kerja yang berada di luar negeri tetapi mampu melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia secara optimal.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi dan tertarik mengambil tema tentang: “EVALUASI SISTEM KOMPUTERISASI ONLINE TENAGA KERJA LUAR NEGERI (SISKOTKLN) (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa aspek tersebut, muncul sebuah rumusan masalah mengenai hal tersebut yakni:

1. Bagaimana evaluasi ketercapaian program Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dalam upaya penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi ketercapaian program Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dalam upaya melindungi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan SISKOTKLN di Kabupaten Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang sosial, khususnya mengenai kependudukan dan ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

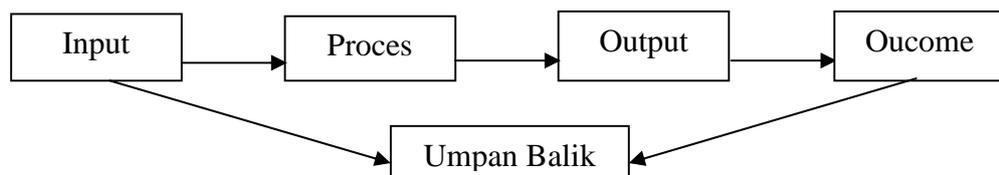
- a. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam perbaikan sistem penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri.
- b. Bagi Masyarakat, mendapatkan informasi tentang sistem penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri yaitu SISKOTKLN, rekrutmen CTKI yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, masalah-masalah yang dihadapi oleh TKI di luar negeri dan di dalam negeri serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan SISKOTKLN dalam upaya untuk melindungi TKI ke luar negeri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang bermuara pada keputusan tentang alternatif terbaik. William N Dunn dalam Pasolong (2010:39), kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain. Dunn dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Analisis kebijakan Publik” (2003) mengungkapkan bahwa kebijakan merupakan sebagai suatu proses, yang digambarkan seperti dalam gambar:



(Sumber : William N. Dunn. 2003:39)

Gambar 1. Kebijakan Sebagai Suatu Proses

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan kebijakan publik adalah suatu proses pengambilan keputusan oleh seseorang, lembaga, atau pejabat pemerintah. Bentuk dari kebijakan publik adalah peraturan-peraturan dan perundang-undangan, jadi kebijakan publik ini dapat artikan sebagai suatu hukum.

B. Tinjauan Evaluasi

1. Definisi Evaluasi

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2003:608).

Evaluasi menurut Abidin mencakup 3 pengertian:

1. Evaluasi awal, proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplmentasikan

2. Evaluasi dalam proses implementasi/monitoring
 3. Evaluasi akhir yang dilakukan setelah proses implementasi kebijakan
- (Abidin, 2002:165)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya sejauh mana tujuan dicapai. Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu indikator untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat indikator evaluasi sebagai berikut:

2. Indikator Evaluasi

Tabel 3. Indikator Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

(Sumber : Dunn, 2003:610).

Indikator-indikator di atas merupakan tolak ukur dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan

pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif, lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Efektivitas

William Dunn (2003) menyatakan bahwa: Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya (Dunn, 2003:429).

b. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per-unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

c. Kecukupan

William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi (Dunn, 2003:430).

d. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan

dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan (Dunn, 2003:437).

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut, artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis (Dunn, 2003:499).

Menurut Pasolong (2010:60) untuk dapat mengevaluasi diperlukan rincian apa yang perlu dievaluasi, pengukuran terhadap kemajuan yang diperoleh dengan mengumpulkan data, dan analisis terhadap data yang ada terutama berkaitan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan suatu program. Oleh karena itu alasan peneliti ingin mengevaluasi program SISKOTKLN ini dikarenakan peneliti ingin mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan dan hasil dari

program SISKOTKLN sehingga sistem ini dapat bermanfaat bagi penggunanya.

C. Tinjauan Evaluasi Program

1. Definisi Evaluasi program

Evaluasi program merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi program tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan kedepan. Wirawan (2011:17) menjelaskan bahwa semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program

Menurut Isaac dan Michael (1984) dikutip dalam Ajuang (2015:11) sebuah program harus diakhiri dengan evaluasi. Hal ini dikarenakan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut mereka, ada tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu: (1) menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, (2) mencari data yang relevan dengan penelitian dan (3) menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut. Evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang

dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Melakukan evaluasi program ialah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan.

Sistem evaluasi juga diperlukan sebagai cara untuk mencari umpan balik sebagai masukan untuk perencanaan baru dan sebagai sarana untuk pengecekan/pengujian ganda bahwa yang dipilih sudah konsisten, tepat, dan dapat dijalankan dengan analisis internal dan eksternal serta rencana untuk melaksanakannya. Umpan balik tersebut juga digunakan untuk melakukan kegiatan perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan secara terus-menerus. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan rencana. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil.

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar (2018:7) terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi

sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu.

- b. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya.

Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

2. Model Evaluasi Program

Model-model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang program yang sudah dievaluasi.

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2018:40), membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

a. Goal Oriented Evaluation

Model evaluasi berbasis tujuan yang dikembangkan oleh Tyler, Tyler merupakan model evaluasi tertua, W. Tyler dalam Wirawan (2011:80) mendefinisikan evaluasi sebagai “...*process of determining to what extent the educational objective are actually being realized*”. Evaluasi merupakan proses menentukan seberapa tinggi tujuan sesungguhnya dapat dicapai.

b. Decision Oriented Evaluation

Model ini, evaluasi harus dapat memberikan landasan berupa informasi-informasi yang akurat dan obyektif bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan program. Evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh stufflebeam merupakan salah satu contoh model evaluasi ini. Model CIPP merupakan salah satu model yang paling sering dipakai oleh evaluator. Model ini terdiri dari 4 komponen evaluasi sesuai dengan nama model itu sendiri yang merupakan singkatan dari *Context, Input, Process* dan *Product*.

Menurut H. B. Sutopo dalam Wahyudi (2010:33), penelitian evaluasi yang menggunakan model *CIPP*, proses evaluasi akan memperhatikan keberkaitan secara menyeluruh, mulai dari konteksnya

yang meliputi informasi dari beberapa faktor mengenai kondisi dan karakteristik konteks sebelum suatu program dilaksanakan, masukan (*input*) yang diberikan sebagai persiapan pelaksanaan program supaya bisa berjalan lancar, proses bagaimana program dilakukan dari awalnya dengan pendekatannya apakah sesuai dengan konteksnya dan merupakan proses yang tepat untuk mencapai tujuan program, dan akhirnya bagaimana kualitas hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan program yang dievaluasi tersebut.

c. *Responsive Evaluation Model* (Robert Stake's)

Menurut Muryadi (2017:9), Model ini menekankan pada pendekatan kualitatif-naturalistik. Evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran melainkan pemberian makna atau melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami semua komponen program melalui berbagai sudut pandangan yang berbeda. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka model ini kurang percaya terhadap hal-hal yang bersifat kuantitatif. Instrumen yang digunakan pada umumnya mengandalkan observasi langsung maupun tak langsung dengan interpretasi data yang impresionistik. Langkah-langkah kegiatan evaluasi meliputi observasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal (*preliminary understanding*) dan mengembangkan desain atau model.

Berdasarkan langkah-langkah ini, evaluator mencoba responsif terhadap orang-orang yang berkepentingan pada hasil evaluasi. Hal yang penting dalam model responsif adalah pengumpulan dan sintesis data. Kelebihan model ini adalah peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuannya mengakomodasi pendapat yang ambigu serta tidak fokus. Sedangkan kekurangannya antara lain (1) pembuat keputusan sulit menentukan prioritas atau penyederhanaan informasi (2) tidak mungkin menampung semua sudut pandangan dari berbagai kelompok (3) membutuhkan waktu dan tenaga. Evaluator harus dapat beradaptasi dengan lingkungan yang diamati. Penilaian itu dapat berarti bila dapat mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandangan dari semua orang yang terlibat, yang berminat, dan yang berkepentingan dengan program. Evaluator tak percaya ada satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang dapat ditemukan dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik. Setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik, dan evaluator mencoba menolong menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskannya atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluator adalah berusaha mengerti urusan program melalui berbagai sudut pandangan yang berbeda.

Sebagaimana dicatat oleh Young dalam Muryadi (2017:9) evaluator dapat menyatakan dengan jelas dalam sebuah organisasi yang ada klien yang berbeda untuk berbagai layanan yang mereka sediakan.

Bagi evaluator untuk memainkan peran lebih besar dalam pengukuran kinerja: "Para evaluator bisa menjadi 'navigator' untuk membantu seseorang mendapatkan informasi lebih untuk ukuran kinerja mereka".

d. *Formative-Sumatif Evaluation Model* (Michael Scriven's)

Scriven dalam Muryadi (2017:11), menyebutkan tanggung jawab utama dari para penilai adalah membuat keputusan. Akan tetapi harus mengikuti peran dari penilaian yang bervariasi. Scriven mencatat sekarang setidaknya ada 2 peran penting: formatif, untuk membantu dalam mengembangkan kurikulum, dan sumatif, yakni untuk menilai manfaat dan kurikulum yang telah mereka kembangkan dan penggunaannya atau penempatannya. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program. Evaluasi formatif dilaksanakan pada saat implementasi program sedang berjalan. Fokus evaluasi berkisar pada kebutuhan yang dirumuskan oleh karyawan atau orang-orang dalam program. Evaluator sering merupakan bagian dari program dan kerja sama dengan orang-orang dalam program. Strategi pengumpulan informasi mungkin juga dipakai tetapi penekanan pada usaha memberikan informasi yang berguna secepatnya bagi perbaikan program.

Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai manfaat suatu program sehingga dari hasil evaluasi akan dapat ditentukan suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan. Pada evaluasi sumatif difokuskan

pada variabel-variabel yang dianggap penting bagi sponsor program maupun pihak pembuat keputusan. Evaluator luar atau tim review sering dipakai karena evaluator internal (Muryadi, 2017:11).

e. *Measurement Model* (Edward L. Thorndike dan Robert L. Ebel)

Model pengukuran (*measurement model*) banyak mengemukakan pemikiran- pemikiran dari R Edward L. Thorndike dan Robert L. Ebel. Sesuai dengan namanya, model ini sangat menitikberatkan pada kegiatan pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat (*attribute*) tertentu yang dimiliki oleh objek, orang maupun peristiwa, dalam bentuk unit ukuran tertentu. Dalam bidang pendidikan, model ini telah diterapkan untuk mengungkap perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat dan sikap. Hasil evaluasi digunakan untuk keperluan seleksi peserta didik, bimbingan, dan perencanaan pendidikan. Objek evaluasi dalam model ini adalah tingkah laku peserta didik, mencakup hasil belajar (kognitif), pembawaan, sikap, minat, bakat, dan juga aspek-aspek kepribadian peserta didik. Instrumen yang digunakan pada umumnya adalah tes tertulis (*paper and pencil test*) dalam bentuk tes objektif, yang cenderung dibakukan. Oleh sebab itu, dalam menganalisis soal sangat memperhatikan *difficulty index* dan *index of discrimination*. Model ini menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Norma (*norm- referenced assessment*) (Muryadi, 2017:12).

Tokoh model pengukuran (measurement model) adalah Edward L. Thorndike dan Robert L. Ebel. Purwanto dalam Muryadi (2017:13) menjelaskan beberapa ciri dari model pengukuran adalah :

1. Mengutamakan pengukuran dalam proses evaluasi. Pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang.
2. Evaluasi adalah pengukuran terhadap berbagai aspek tingkah laku untuk melihat perbedaan individu atau kelompok. Oleh karena tujuannya adalah untuk mengungkapkan perbedaan, maka sangat diperhatikan tingkat kesukaran dan daya pembeda masing-masing butir, serta dikembangkan acuan norma kelompok yang menggambarkan kedudukan seseorang dalam kelompok.
3. Ruang lingkup adalah hasil belajar aspek kognitif.
4. Alat evaluasi yang digunakan adalah tes tertulis terutama bentuk objektif.
5. Meniru model evaluasi dalam ilmu alam yang mengutamakan objektivitas. Oleh karena itu model ini cenderung mengembangkan alat-alat evaluasi yang baku. Pembakuan dilakukan dengan mencobakan kepada sampel yang cukup besar untuk melihat validitas dan reliabilitasnya.

g. *Goal Free Evaluation*

Model yang dikemukakan oleh Michael Scriven ini yakni *Goal Free Evaluation Model*, menurut Scriven model evaluasi ini merupakan evaluasi mengenai pengaruh yang sesungguhnya, objektif yang ingin dicapai oleh program. Ia mengemukakan bahwa evaluator seharusnya tidak mengetahui tujuan program sebelum melakukan evaluasi. Evaluator melakukan evaluasi untuk mengetahui pengaruh yang sesungguhnya dari operasi program (Wirawan, 2011:84)

Model evaluasi bebas tujuan menjelaskan bahwa para evaluator atau penilai mengambil dari berbagai laporan atau catatan pengaruh-pengaruh nyata atau kongkrit dan pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan dalam program pendidikan dan pelatihan. Perhatian khusus diberikan secara tepat terhadap usulan tujuan-tujuan dalam evaluasi, tetapi tidak dalam proses evaluasi atau produk. Keuntungan yang dapat diambil dari evaluasi bebas tujuan, bahwa dalam evaluasi bebas tujuan para penilai mengetahui antisipasi pengaruh-pengaruh penting terhadap tujuan dasar dari penilai yang menyimpang.

Sistem evaluasi program dalam penelitian ini diperlukan sebagai masukan untuk membuat perencanaan baru dan sebagai sarana untuk menguji suatu program kegiatan melalui perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada tujuan dan hasil dari pelaksanaan suatu program sehingga dapat memberi manfaat. Penelitian ini menggunakan

model evaluasi *Goal Oriented* yang dikembangkan oleh Tyler karena model evaluasi ini memberikan petunjuk tentang perkembangan program SISKOTKLN, menjelaskan hubungan antara tujuan program yang ditawarkan dan hasil yang akan dicapai. Dengan menggunakan model ini peneliti dapat mengukur sejauh mana pencapaian suatu program, dengan merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan dan kegiatan

D. *Goal Oriented Evaluation Model*

Goal Oriented Evaluation Model (GOEM) atau model evaluasi yang berorientasi pada tujuan, merupakan model yang muncul paling awal dan dikembangkan oleh Tyler yaitu merupakan suatu model evaluasi yang menekankan peninjauan pada tujuan sejak awal kegiatan dan berlangsung secara berkesinambungan.

Model evaluasi program berbasis tujuan ini secara umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program atau proyek dapat dicapai atau tidak. Model ini memfokuskan pada mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan kebijakan, program dan proyek untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan (Wirawan, 2011:81)

Model evaluasi program yang ini secara teknologis telah merangsang berkembangnya proses-proses perumusan tujuan secara spesifik serta pengembangan atau penemuan instrument-instrumen maupun prosedur pengukuran yang beragam. Objek yang akan menjadi pengamatan

pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelum program tersebut dimulai. Secara eksplisit model evaluasi ini mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran program, tetapi secara implisit evaluasi berguna untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dicapai oleh objek evaluasi berdasarkan kepada standar-standar tertentu. Apakah terdapat suatu kesenjangan antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Karena hasil evaluasi merupakan salah satu landasan untuk menentukan apakah suatu program berjalan secara efektif atau gagal mencapai tujuannya (Firdaus, 2014:12)

Jika dilihat dari penerapannya, model ini menggunakan unsur pengukuran dengan usaha secara konstan, paralel, dengan melengkapi legitimasi untuk mengangkat pemahaman tentang evaluasi. Pada model yang berorientasi pada tujuan ini sangat membedakan antara konsep pengukuran dan evaluasi. Menurut Tyler, pengetahuan pengukuran dan pengetahuan evaluasi terpisah dan merupakan proses dimana pengukuran hanya satu dari beberapa kemungkinan salah satu cara dalam mendukung tercapainya evaluasi (Firdaus, 2014:12).

Langkah-langkah pendekatan evaluasi berorientasi tujuan (*goal oriented evaluation*) yang dikemukakan Tyler, yaitu:

- 1). Perumusan tujuan yang akan diukur,
- 2). Pemilihan instrumen,
- 3). Pemilihan desain evaluasi,
- 4). Pengumpulan dan analisis data,

5). Interpretasi hasil.

Langkah-langkah sebagaimana diuraikan di atas merupakan suatu siklus, artinya bahwa jika dari hasil perbandingan tujuan yang sudah diperoleh berupa kesenjangan-kesenjangan, maka perlu dilakukan perumusan/ penentuan ulang tujuan program yang telah dievaluasi tersebut (Abidin, 2002:5).

Indikator yang digunakan oleh Tyler dalam Goal Oriented Evaluation untuk mengukur tingkat ketercapaian program yakni sebagai berikut :

1. Tujuan

Suatu program harus menetapkan atau merumuskan tujuan-tujuan spesifiknya secara jelas untuk melakukan pengukuran terhadap kemajuan dan efektivitas inovasinya (Ananda & Rafida, 2017:46). Terhadap tujuan-tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya barulah evaluasi program difokuskan. Sehingga hubungan antara ketercapaian tujuan dapat dilihat dari ketepatan sasaran kegiatan suatu program yang telah dijalankan.

2. Hasil

Hasil digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan selanjutnya antara lain :

a. Output yaitu hasil dari suatu program yang telah dilaksanakan

- b. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan program yang dilaksanakan, apakah memiliki pengaruh dan dampak dengan adanya program tersebut, serta dampak suatu program setelah dilakukan evaluasi secara seksama (Ananda & Rafida, 2017:57).

Evaluasi diartikan sebagai proses pengukuran terhadap tujuan dan hasil program yang hendak dicapai. Peneliti menganggap *Goal Oriented Model* ini sangat sesuai dan tepat untuk mengukur pencapaian program SISKOTKLN, dengan menggunakan model ini peneliti dapat melihat dan merumuskan kembali tujuan program serta menjelaskan hubungan antara tujuan dengan hasil dari program tersebut. Selanjutnya, model ini dapat digunakan untuk menjelaskan rencana pelaksanaan kegiatan suatu program dengan proses pencapaian tujuan. Instrumen yang digunakan bergantung kepada tujuan yang ingin diukur. Hasil evaluasi akan menggambarkan tingkat keberhasilan tujuan dan hasil program berdasarkan kriteria program khusus.

E. Tinjauan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)

Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik menjadi hal yang tidak dapat dihindari seiring dengan kemajuan zaman. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah dengan pemanfaatan *e-government*

(pemerintahan elektronik). Dimana konsep *e-government* pada dasarnya merujuk pada penggunaan teknologi internet dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. Salah satu perwujudan dari semangat *e-government* adalah SISKOTKLN yang merupakan suatu sistem komputerisasi sehingga dapat mengelola data secara cepat, tepat, dan akurat serta dapat menerima, menyimpan data dan memberikan informasi sesuai dengan instruksi yang diberikan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam BAB VI pasal 38 Tujuan dari pelaksanaan SISKOTKLN adalah :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. Memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia.

Hasil dari SISKOTKLN adalah sebuah *smart card* yakni *Elektronik* Kartu tenaga kerja luar negeri yang selanjutnya disebut e-KTKLN, dimana e-KTKLN adalah identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. Kartu yang berbentuk *smart card* yang memuat data identitas TKI, PPTKIS, mitra kerja dan pengguna TKI,

paspor, asuransi, uji kesehatan, sertifikat pelatihan, sertifikat uji kompetensi, perjanjian kerja, jenis pekerjaan dan negara penempatan, masa berlaku, tempat penerbitan, dan embarkasi/debarkasi.

a. Penerapan SISKOTKLN

SISKOTKLN bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, dimana konsep melindungi dimulai dari :

1. Pra-penempatan

- a). Rekrutmen calon tenaga kerja Indonesia
- b). Pelatihan dan Pembekalan tenaga kerja Indonesia

2. Penempatan

- a). Sistem pendukung e-KTKLN
- b). Fungsi e-KTKLN di negara penempatan

3. Purna Penempatan

- a). Pemulangan tenaga kerja Indonesia
- b). Penjemputan tenaga kerja Indonesia

b. Implikasi SISKOTKLN

Sebagaimana bahwa penerapan SISKOTKLN dengan sistem online akan berdampak pada pengurangan calo dan tertib administrasi, maka indikator implikasi penerapan SISKOTKLN dapat dilihat dari:

- 1. Tertib administrasi
- 2. Pengurangan calo
- 3. Proteksi tenaga kerja Indonesia

c. Kendala Penerapan SISKOTKLN

Beberapa kendala yang sering muncul dalam inovasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik dan penerapan kebijakan adalah aktor-aktor yang terlibat sebagai pelaksana serta lingkungan, maka kendala dalam penerapan SISKOTKLN dapat dilihat dari indikator-indikator berikut:

1. Sumber daya
2. Isu Kebijakan
3. Kapasitas sistem
4. Respon tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI, 2018).

Sementara tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Dimana para TKI yang bekerja di luar negeri tersebut juga harus tetap mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah (UU Nomor 39 Tahun 2004).

Sesuai amanat dari Permenakertrans Nomor 14/MEN/X/2010 Pasal 39 Ayat 3 yang menyebutkan sistem pendataan TKI pada SISKOTKLN merupakan bagian dari sistem online yang diciptakan dan dikembangkan BNP2TKI untuk pelayanan TKI. Pelaksanaan SISKOTKLN telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Nomor PER-26/KA/X11/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri, SISKOTKLN adalah

sistem pelayanan administrasi penempatan, perlindungan TKI dan penerbitan Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) yang melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional. Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.



Gambar 2. Alur Penempatan dan Perlindungan TKI

Berdasarkan gambar dua sedikit menjelaskan mengenai alur penempatan dan perlindungan TKI sebagai berikut :

1. Penempatan TKI

Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

2. Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja

- a. Penempatan oleh PPTKIS
- b. Penempatan oleh Pemerintah
- c. Penempatan Kepentingan Perusahaan Sendiri
- d. Penempatan Perseorangan/TKI Mandiri

Kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diarahkan untuk memaksimalkan penempatan dan perlindungan terhadap TKI dengan mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak masa pra-penempatan, selama bekerja di negara penempatan sampai kembali ke tanah air di daerah asal TKI. Sebagai sebuah kebijakan dan atau program yang melibatkan warga negara, maka sesuai amanat Konstitusi, pemerintah memikul tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab ini juga sangat luas, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap

keselamatan warga negara atau TKI yang bekerja di luar negeri. Dengan mencermati UU No. 39 Tahun 2004, dapat dilihat distribusi tanggung jawab yang dipikul oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan perwakilan RI di luar negeri, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat
 - a. Mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (Pasal 5, 86 dan 92).
 - b. Bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI (Psl 6).
 - c. Melaksanakan penempatan TKI di luar negeri (Pasal 10).
 - d. Menerbitkan dan mencabut SIPPTKI (Pasal 12 dan 18).
 - e. Mengumumkan daftar PPTKIS, Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah setiap 3 (tiga) bulan [Pasal 25 ayat (4)].
 - f. Menjamin terpenuhinya hak calon tenaga kerja Indonesia/ tenaga kerja Indonesia baik yang berangkat melalui prosedur penempatan tenaga kerja Indonesia maupun yang berangkat secara mandiri.
 - g. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon tenaga kerja di luar negeri.
 - h. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di negara penempatan.

- i. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa para penempatan, masa penempatan dan masa purna penempatan (Pasal 7).
- j. Menetapkan negara yang tertutup untuk TKI [Pasal 27 ayat (2)].
- k. Membuat ketentuan tentang diklat kerja bagi CTKI (Pasal 47).
- l. Membuat ketentuan tentang penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi CTKI (Pasal 49).
- m. Menerbitkan *Elektronik* Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (Pasal 62).
- n. Menyediakan pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI (Pasal 66).
- o. Mengatur program asuransi untuk TKI [Pasal 68 ayat (2)].
- p. Melaksanakan pembekalan akhir pemberangkatan [Pasal 69 ayat (3)].
- q. Mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi [Pasal 73 ayat (3)].
- r. Melakukan pembinaan dalam bidang informasi, sumber daya manusia, perlindungan tenaga kerja Indonesia (Pasal 87).
- s. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur UU (Pasal 101).

2. Pemerintah Provinsi

- a. Pelimpahan sebagian kewenangan atau tugas perbantuan dari pemerintah pusat dalam mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri [Pasal 5 ayat (2)].
- b. Bersama pemerintah mengurus kepulauan tenaga kerja Indonesia sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi [Pasal 73 ayat (3)].
- c. Membantu menyelesaikan masalah antar tenaga kerja Indonesia dengan PPTKIS [Pasal 85 ayat (2)].
- d. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke pusat [Pasal 93 ayat (1)].
- e. Melakukan penyidikan tindak pidana (Pasal 101).

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

- a. Pelimpahan sebagian wewenang atau tugas perbantuan perintah mengatur, membina dan mengawasi PPTKIS [Pasal 5 ayat (2)].
- b. Melakukan pendaftaran calon tenaga kerja Indonesia [Pasal 36 ayat (1)].
- c. Sebagai saksi penandatanganan perjanjian penempatan [Pasal 38 ayat (2)].
- d. Sebagai saksi perundingan perjanjian kerja [Pasal 55 ayat (3)].

- e. Bersama pemerintah mengurus kepulangan tenaga kerja Indonesia sampai ke daerah asal dalam hal terjadinya perang, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi [Pasal 77 ayat (3)].
- f. Membantu penyelesaian masalah TKI dengan PPTKIS [Pasal 85 ayat (2)].
- g. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri Pusat [Pasal 93 ayat (1)].
- h. Melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana (Pasal 101).

4. Kantor Perwakilan RI

- a. Menilai mitra usaha dan pengguna (Pasal 25).
- b. Menyetujui *job order* dari pengguna, perjanjian kerjasama penempatan dan kewenangan perjanjian kerja [Pasal 32 ayat (3)].
- c. Menyetujui perpanjangan perjanjian kerja (Pasal 58).
- d. Bersama pemerintah mengurus kepulangan tenaga kerja Indonesia sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi [Pasal 73 ayat (3)].
- e. Memperoleh informasi dari PPTKIS tentang keberangkatan dan kepulangan tenaga kerja Indonesia [Pasal 9 dan Pasal 7 ayat (1)].
- f. Memberikan perlindungan dan pembinaan pada tenaga kerja Indonesia [Pasal 78 ayat (1)].
- g. Melakukan binwas terhadap Perwakilan PPTKIS (Pasal 79).

- h. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan [Pasal 92 ayat (2)].

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang berjalan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
Anang Sugeng Cahyono (2015)	Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah Asal Kabupaten Tulung Agung	Hasil penelitian ini mengenai permasalahan calon TKI maupun TKI saat berada di luar negeri (pada keluarga di daerah asal), diperlukan strategi khusus dalam mengatasi permasalahan sosial yang dialami TKI dan Keluarganya di daerah asal. Berbagai kebijakan berupa program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, memberikan layanan informasi, memberikan layanan sosial, dan memberikan perlindungan sosial kepada mereka dan keluarga yang berada di daerah asal. Untuk ini perlu dirancang strategi program dan kegiatan yang antisipatif terhadap permasalahan TKI tersebut.	Penelitian yang dilakukan oleh Anang Sugeng Cahyono membahas mengenai evaluasi permasalahan sosial yang dialami TKI serta strategi khusus dalam mengatasi permasalahannya tersebut, sedangkan, penulis membahas mengenai evaluasi program sistem komputerisasi online tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui BNP2TKI dalam upaya penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
Wildan Usama Martoyo (2015)	Evaluasi Implementasi Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar	Hasil akhir dari SISKOTKLN adalah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang menjadi	Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Usama Martoyo membahas mengenai Evaluasi dan

	<p>Negeri (SISKOTKLN) dengan Pendekatan <i>System Utility</i> (Studi Kasus pada Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah)</p>	<p>identitas serta bukti bahwa pelamar telah memenuhi prosedur dan kualifikasi sebagai TKI di luar negeri. Setelah diimplementasikan selama lima tahun, sistem ini belum pernah dievaluasi. Padahal evaluasi diperlukan sebagai umpan balik terhadap perbaikan sistem guna memberikan pertimbangan, masukan, dan perbaikan dari berbagai aspek. Seperti fitur aplikasi, kendala teknis implementasi, dan kebijakan pendukung. <i>System Utility</i> adalah pendekatan untuk mengevaluasi sistem informasi yang menekankan pada sudut pandang <i>posession, form, place, time, actualization, dan goal</i>. Pada penelitian ini dipilih pandang <i>posession, goal</i> dan <i>place</i> yang dianggap dapat mewakili kondisi utama dari implementasi sistem. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan sistem baik dari segi fitur aplikasi, sarana dan prasarana pendukung, serta kebijakan implementasi lainnya, sehingga dapat meningkatkan utilitas dari SISKOTKLN.</p>	<p>Impelementasi penerapan program SISKOTKLN dengan menggunakan Pendekatan <i>System Utility</i> pada Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) untuk mengevaluasi sistem informasi yang menekankan pada sudut pandang <i>posession, form, place, time, actualization, dan goal.</i>, sedangkan penulis membahas mengenai evaluasi SISKOTKLN dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif alasannya bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berasal dari hasil riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis menggunakan Indikator Evaluasi Kebijakan oleh William Dunn indikator evaluasi menurut William Dunn yaitu efektifitas keberhasilan program dapat tercapai, Responsivitas pencapaian program SISKOTKLN untuk memenuhi kebutuhan TKI, dan Ketepatan tercapainya tujuan dan sasaran program SISKOTKLN di Kabupaten Lampung Tengah.</p>
<p>Ulin Nafi'ah (2015)</p>	<p>Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) Dalam Upaya Untuk Melindungi Tenaga Kerja Luar Negeri (Studi</p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Perlindungan yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Blitar kepada tenaga kerja di luar negeri meliputi pra-penempatan, masa penempatan dan purna penempatan dengan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ulin Nafiah membahas tentang bagaimana penerapan SISKOTKLN dalam upaya melindungi tenaga kerja luar negeri, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai</p>

	Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar).	penerapan SISKOTKLN yang akhirnya bermuara menjadi KTKLN. Karena, masih terdapat TKI yang berangkat ke luar negeri yang tidak memiliki kartu tersebut. Sementara itu, fungsi kartu ini di negara penempatan masih belum didukung oleh sistem dan sinergi yang baik antar <i>stakeholder</i> .	evaluasi program SISKOTKLN dalam upaya penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia Dimulai dari proses pra-penempatan yang meliputi Rekrutmen serta Pelatihan dan Pembekalan calon TKI, penempatan yang meliputi sistem pendataan, serta purna penempatan yang meliputi pemulangan dan penjemputan tenaga kerja Indonesia.
--	---	---	---

(Sumber: diolah oleh Peneliti, 2018)

H. Kerangka Pikir

Pemerintah menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja No. PER-26/KA/X11/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri, SISKOTKLN adalah sistem pelayanan administrasi penempatan TKI dan penerbitan *Elektronik* Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait, dengan diterapkannya SISKOTKLN diharapkan proses administrasi yang layak, cepat, murah dan efisien kepada warga negaranya yang akan bekerja keluar negeri.

Pelaksanaan SISKOTKLN di Kabupaten Lampung Tengah ini sudah berjalan dari tahun 2012 pada instansi pemerintah terkait seperti Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan data dan observasi di lapangan yang telah dilakukan,

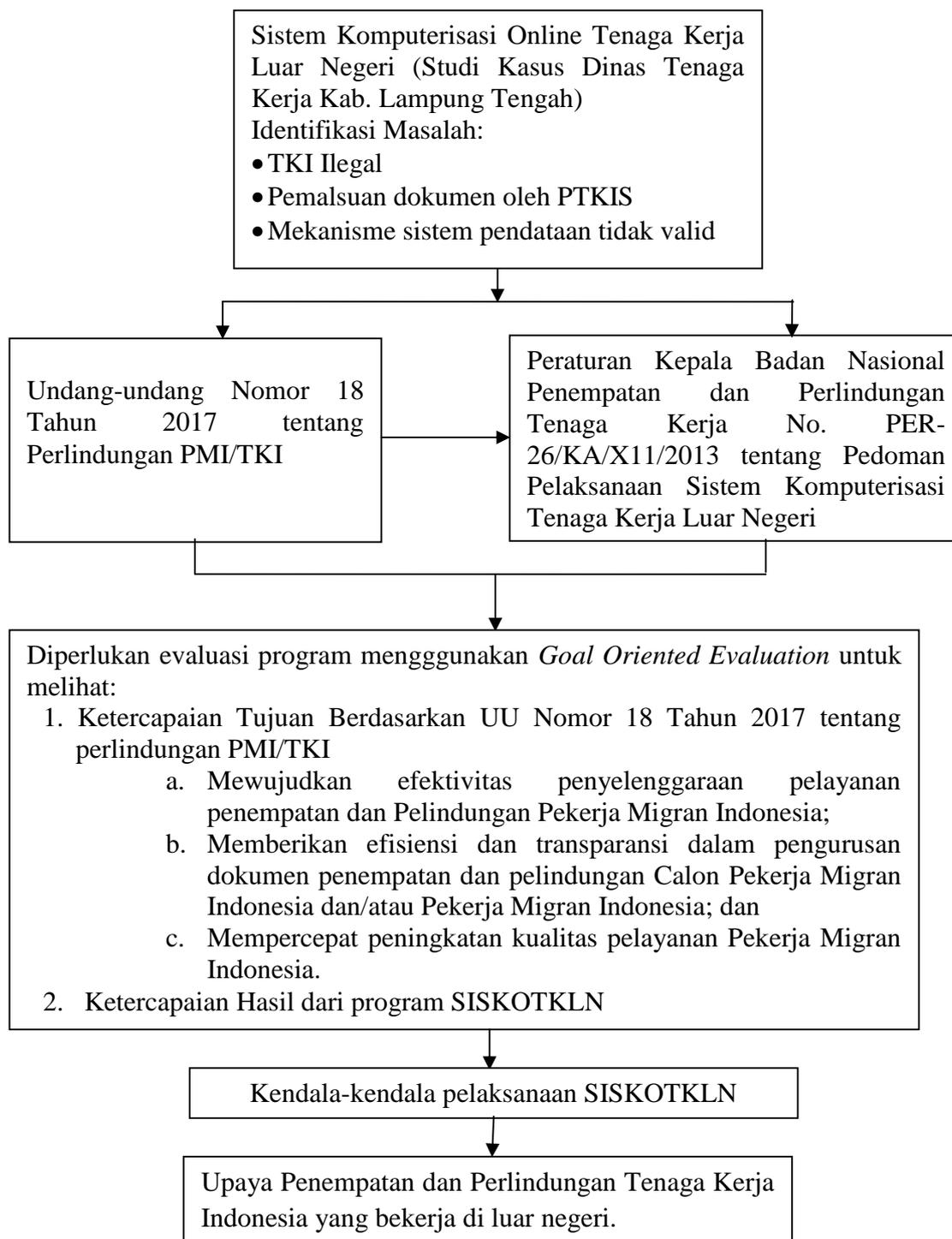
masih menunjukkan beberapa permasalahan terkait program penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada Kabupaten Lampung Tengah, dilihat dari permasalahan pertama, gangguan server/jaringan komunikasi data seperti *down system* dan *overload*. Kedua, minimnya jumlah aparat dari pemerintah daerah dalam melakukan pendataan calon TKI, Ketiga, Mekanisme sistem perubahan pendataan TKI ke dalam SISKOTKLN masih belum valid, dan yang keempat terkait sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti berusaha mengevaluasi Program Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) menggunakan model evaluasi program yakni *Goal Oriented Evaluation Model* atau model evaluasi program yang berorientasi pada tujuan yang dikembangkan oleh Tyler, dimana evaluasi dalam penelitian ini akan dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus untuk melihat :

1. Tujuan program SISKOTKLN yakni Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam BAB VI pasal 38 Tujuan dari pelaksanaan SISKOTKLN adalah :
 - a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan

- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia.
2. Hasil dari program SISKOTKLN yakni berupa E-KTKLN sebagai identitas TKI yang telah memenuhi prosedur dapat tercapai dengan baik atau tidak serta manfaat yang dirasakan oleh pengguna berkaitan dengan program yang dilaksanakan.

Sehingga hasil yang diperoleh dari evaluasi ini nantinya dapat dipakai untuk merumuskan kembali tujuan dari kegiatan program, mendefinisikan kembali kegiatan/program, prosedur penilaian dan perangkat yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan program. Sehingga diharapkan sistem ini tidak hanya berhenti pada tataran pencatatan jumlah tenaga kerja yang berada di luar negeri tetapi mampu melakukan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia secara optimal.



(Sumber: diolah oleh peneliti, 2018)

Gambar 3. Kerangka Pikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2012:14-15).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, atau suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, yang memiliki tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Evaluasi Program Sistem Layanan Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung. Menggunakan model evaluasi program yakni *Goal Oriented Evaluation Model* atau model evaluasi program yang berorientasi pada tujuan yang dikembangkan oleh Tyler, dimana evaluasi dalam penelitian ini akan dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus untuk melihat :

A. *Goal Oriented Evaluation Model*

1. Ketercapaian Tujuan Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI/TKI
 - a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia.
2. Ketercapaian Hasil dari program SISKOTKLN
 - a. *Output*
 - b. *Outcome*

B. Kendala-kendala Pelaksanaan SISKOTKLN

Sehingga hasil yang diperoleh dari evaluasi ini nantinya dapat dipakai untuk merumuskan kembali tujuan dari kegiatan program, mendefinisikan kembali kegiatan/program, prosedur penilaian dan perangkat yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan program. Sehingga diharapkan sistem ini tidak hanya berhenti pada tataran pencatatan jumlah tenaga kerja yang berada di luar negeri tetapi mampu melakukan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia secara optimal.

C. Lokasi Penelitian

Tempat (*locus*) penelitian Evaluasi Penerapan SISKOTKLN pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Tengah dan Balai Penempatan, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Lampung yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, serta Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang terkait dengan SISKOTKLN. Pemilihan Kabupaten Lampung Tengah sebagai lokasi penelitian dikarenakan dalam penerapan SISKOTKLN yang bisa diakses secara online Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup lama menerapkannya yaitu pada tahun 2012, jadi bisa dilihat sejauh mana keberhasilannya sistem tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diambil dalam Penelitian ini data secara langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah serta Badan Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri adalah hasil-hasil data yang diambil dengan cara wawancara kepada informan (orang yang dimintai data) dan didukung dengan dokumen berupa foto-foto kegiatan diambil sendiri oleh peneliti pada saat melakukan riset pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data yang mendukung data primer, mencakup data lokasi penelitian dan data lain yang mendukung masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari observasi dan literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu juga, data sekunder bisa diperoleh melalui foto-foto dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian yakni:

- 1) Dokumen jumlah registrasi SISKOTKLN
- 2) Profil DISNAKERTRANS
- 3) Tupoksi DISNAKERTRANS
- 4) Peraturan BNP2TKI
- 5) Pedoman Pelaksanaan SISKOTKLN

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengamatan langsung dalam penelitian melalui pertanyaan-pertanyaan langsung kepada responden, wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung. Wawancara disini ditujukan kepada pegawai dan pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Tengah dan pegawai BP3TKI Provinsi Lampung. Wawancara dilakukan pada bertujuan

untuk melengkapi data mengetahui sejauh mana keberhasilan sistem layanan SISKOTKLN.

Tabel 5. Informan Terkait Evaluasi SISKOTKLN

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ibu Faiza	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga kerja dan Tarnsmigrasi Kab. Lampung tengah	Perangkat Dinas Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi Kab. Lampung tengah
2.	Ibu Sri Hanturyati	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga kerja dan Tarnsmigrasi Kab. Lampung tengah	Perangkat Dinas Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi Kab. Lampung tengah
3.	Ibu Nisa	Staff Operator	Perangkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung tengah
4.	Bapak Muhammad Medi	Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Lampung.	Perangkat Teknis BP3TKI Provinsi Lampung
5.	Ibu Dhani	Staff Pengelola Penyiapan dan Penempatan TKI BP3TKI Lampung	Perangkat Teknis BP3TKI Provinsi Lampung
6.	Bapak Sugino	Pihak PPTKIS	Perangkat Teknis PPTKIS Kab. Lampung Tengah
7.	Bapak Judi	Pihak PPTKIS	Perangkat Teknis PPTKIS Kab. Lampung Tengah
8.	Angga Syahputra	Calon TKI	Tenaga kerja pengguna SISKOTKLN
9.	Pratiwi	Mantan TKI	Tenaga kerja pengguna SISKOTKLN

(Sumber : diolah oleh Peneliti, 2018)

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak yang membahas mengenai objek yang akan diteliti untuk mencari

data tentang Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 6. Dokumentasi Terkait SISKOTKLN

No.	Nama Dokumen
1.	Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOTKLN)
2.	Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja No. PER-26/KA/X11/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri;
3.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4.	UU No.13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja Indonesia;
5.	UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja TKI di Luar Negeri;
6.	UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018)

3. Observasi

Teknik observasi yaitu metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung dilokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Observasi pada penelitian ini dengan cara pengamatan langsung di lapangan terkait dengan proses pelayanan penempatan TKI melalui SISKOTKLN.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1998) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Sugiyono, 2012:335-336).

Berdasarkan uraian di atas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis selama di lapangan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2012:338). Data yang diperoleh peneliti di lapangan kemudian dipilih melalui reduksi data sehingga didapatkan data yang berfokus dan berhubungan dengan penelitian atau tidak. Dalam penelitian ini, proses mereduksi data dilakukan dengan memilih serta menyeleksi data terkait

SISKOTKLN, lalu memfokuskan pada data yang berkaitan tentang penempatan dan perlindungan TKI.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2012:341). Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ke tiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan (Sugiyono, 2012:345). Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan

pengambilan intisari dari serangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2012:372).

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi data atau cara. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sudut pandang beberapa sumber informan terkait SISKOTKLN. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif menurut Patton dalam Moleong (331:2008).

Metode triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda (Sugiyono, 2012:373-374). Data dari informan akan dibandingkan dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan tersebut berasal dari Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah serta Pegawai BP3TKI Provinsi Lampung. Dokumentasi yang diperoleh peneliti dan Observasi yang dilakukan pada saat peneliti turun ke lapangan di Kabupaten Lampung Tengah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan bahwa evaluasi pelaksanaan program SISKOTKLN pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah sudah mencapai sebagian dari tujuannya jika diukur berdasarkan ketercapaian tujuan dan hasil yang sudah tercantum sebelumnya pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan

Ketercapaian tujuan SISKOTKLN berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 jika dilihat dari ketepatan sasaran SISKOTKLN bagi TKI yakni sebagai mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau TKI dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia sudah tercapai. Akan tetapi untuk memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia pada pelaksanaannya

belum tercapai. Hal ini dikarenakan masih banyak terdapat pelanggaran terkait penyerahan dokumen untuk di input ke dalam sistem.

2. Hasil

Hasil dari SISKOTKLN adalah e-KTKLN dalam bentuk sidik jari TKI yang berisi data identitas TKI sendiri sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja ke luar negeri secara legal. E-KTKLN berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang ke tanah air) serta manfaat untuk mempermudah TKI juga dalam proses registrasi. Informasi yang disimpan pada SISKOTKLN dapat digunakan berbagai pihak yang terkait untuk memperbaiki kualitas layanan terhadap TKI dan masyarakat pada umumnya.

3. Kendala

Kendala Internal dalam pelaksanaan SISKOTKLN adalah kendala gangguan server/jaringan, *overload system*, serta *human error*. Sedangkan kendala eksternal dalam pelaksanaan SISKOTKLN adalah minimnya sumber daya manusia sebagai pelaksana SISKOTKLN dan kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Tengah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jabarkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengawasan antar lembaga terkait SISKOTKLN sehingga praktik kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat di atasi.
2. Perlunya penatan ulang sistem dan pengembangan aplikasi SISKOTKLN dalam melakukan perubahan data TKI sehingga data informasi yang dapat diakses menjadi jelas.
3. Perlu adanya perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program SISKOTKLN di Kabupaten Lampung Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Ananda, R., & Rafida, T. 2017. *Pengantar Evaluasi Program*. Medan: Perdana Publishing
- Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Jabar dan Safrudin. 2018, *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wirawan, 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal :

- Cahyono, Anang Sugeng. 2015. “*Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah Asal Kabupaten Tulung Agung*”. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Tulungagung, Vol 8, No 1, <http://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/44/40>, diakses pada tanggal 2 November 2018 pukul 19.00 WIB
- Muryadi, Agusnico Dwi. Januari 2017. “*Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi*”. Jurnal Ilmiah PENJAS, ISSN : 2442-3874 Vol.3 No.1, Januari 2017 diakses tanggal 1 November 2018 pukul 19.35 WIB.

Nikmatul, Nur jannah. Oktober 2018. *“Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri di Kabupaten Pati”*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 1 No.1, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/19663/18640>, diakses tanggal 30 Agustus 2018 pukul 19.35 WIB.

Noviandi B.M, Dini Destiani, dan Partono, 2012. *Perancangan Sistem Inventori Barang di Bank Sampah Garut*, Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Vol 09 No.32, diakses 30 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB.

Trisnawan, Dkk. 2016. *“Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berkaitan dengan Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Bagi Tenaga Kerja Indonesia”*. Vol. 5 No. 3, diakses tanggal 30 Agustus 2018 pukul 19.35 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

UU No.13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja Indonesia;

UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja TKI di Luar Negeri

UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja No. PER-26/KA/X11/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Skripsi:

Ajuang. 2015. *“Evaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran Keterampilan Kerajinan Tangan di SMA Negeri 1 Pamboang”*. Proposal. Prodi Evaluasi Penelitian Pendidikan, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Makasar.

Martoyo, Wildan Usama. 2015. *“Evaluasi Implementasi Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dengan Pendekatan System Utility (Studi Kasus pada Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah)”*. Skripsi. Fakultas Teknik, Sistem Informasi, Universitas Widyatama Bandung.

Nafi'ah, Ulin. 2015. "*Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) Dalam Upaya Untuk Melindungi Tenaga Kerja Luar Negeri (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar)*". Skripsi. FISIP, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Negeri Malang.

Wahyudi, Arif. 2010. "*Evaluasi Dampak Program Rumah Susun*". Skripsi. FISIP, Ilmu Administrasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Website:

inilampung.com/2018/08/tki-lampung-tengah-hilang-kontak-dengan-keluarga-sejak-tahun-2012 diakses pada tanggal 30 agustus 2018 pukul 20.36

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. dari www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-harus-Sejalan.aspx. diakses pada tanggal 30 agustus 2018 pukul 20.36

Sukarta, A. W. (2017, agustus 16). *TKW asal Lampung meninggal di Malaysia dipulangkan*. www.antaraneews.com/

www.siskotkln.bnp2tki.go.id/ diakses pada tanggal 31 agustus 2018 pukul 20.36

www.bnp2tki.go.id/read/12231/Prosedur-Penempatan-TKI-Hadir-untuk-Melindungi, diakses pada tanggal 31 agustus 2018 pukul 20.36